

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan bernegara Jepang terlebih dahulu sudah dihiasi dengan sejarah kemiliteran, tidak heran jika pada Perang Dunia I Jepang sudah menjadi salah satu negara kuat di Pasifik. Jepang pernah mencapai kemajuan yang luar biasa dalam bidang kemiliteran, dengan modalitas sistem pertahanan yang kuat Jepang berhasil menjajarkan dirinya dengan kekatan-kekuatan utama dunia seperti Amerika Serikat (AS), Rusia, Inggris, Perancis dan Italia. Untuk ukuran Asia, Jepang satu-satunya negara yang menjadi kolonial dan berhasil menguasai Asia Timur dan Asia Tenggara. Jepang pada masa itu berhasil memukul mundur tentara Inggris dan Belanda dari Asia, menguasai Tiongkok, Korea dan berebut kepulauan Kuril, Manchuria, Skhalin dengan Rusia.¹

Kekuasaan Jepang yang ditopang kekuatan militer telah menjadikan negara tersebut sebagai kolonial terbesar di Asia. Kolonialisme yang ditinggalkan oleh Jepang tidak hanya sekedar menguras semua kekayaan alam, negara ini juga menjadikan penduduk daerah koloni sebagai pekerja paksa (*romusha*) dan kaum wanitanya sebagai penghibur atau *jugun ianfu*. Oleh karenanya pasca kekalahan Jepang oleh sekutu, merupakan kabar baik bagi dunia untuk mengancam tindakan tentara Jepang yang dinilai brutal sebagai penjajah. Para jajaran pemimpin Jepang

¹ Abdul Irsan, *Jepang Politik Domestik, Global&Regional*, Makassar, Hasanudin University Press, 2005, Hal. 124

dikecam sebagai penjahat perang dan kemudian diadili di Tokyo, Tribunal. Sentimen internasional akan bangkitnya kembali militerisme Jepang telah menjalar ke seluruh dunia. Hal ini memberi alasan mengapa Jepang hingga saat ini tidak boleh membangkitkan militernya.²

Dasar konstitusi pertahanan pemerintahan Jepang pasca perang adalah UU pasifis yang dirancang untuk menggantikan Konstitusi Meiji oleh pasukan yang dipimpin oleh McArthur. Kekalahan Jepang atas Perang Dunia II mengharuskan bahwa Jepang tidak boleh memiliki kekuatan militer, hal tersebut tertera dalam artikel 9 konstitusi Jepang yang disusun pada 3 Mei 1947 di bawah pendudukan Amerika Serikat atas Jepang pasca Perang Dunia II. Hal tersebut membuat Jepang selalu berada di bawah payung politik dan militer Amerika Serikat.

Perjanjian San Fransisco antara sekutu dengan Jepang yang ditandatangani oleh 49 negara pada 8 September 1951 secara resmi mengakhiri Perang Dunia II dan mengakhiri secara resmi kedudukan Jepang sebagai imperialis. Berakhirnya Perang Pasifik pada bulan Agustus 1945 ditandai dengan kehancuran Jepang yang cukup parah. Ketika menyerah kepada pihak Sekutu, Jepang benar-benar mengalami kehancuran dan penderitaan fisik maupun psikologis. Industrinya dapat dikatakan lumpuh sama sekali dan kelaparan terdapat hampir di seluruh wilayah Jepang.

Selain itu Jepang harus memberikan kompensasi terhadap negara korban imperialisme Jepang. Selama lebih kurang tujuh tahun di bawah pendudukan Sekutu (1945-1952), Jepang berusaha bangkit kembali dengan melakukan

² Sugeng Riyanto, *Evolusi Sistem Pertahanan Jepang*, Yogyakarta, Prudent Media, 2012, Hal. 11-12

berbagai reformasi politik, ekonomi dan pendidikan. Berdasarkan pengalaman di Perang Dunia II, di permulaan kemenangannya pihak AS memang secara sengaja berusaha “memasung” Jepang agar tidak lagi memiliki kemampuan politik dan militer yang dapat mengancam negara-negara lain. Pemasangan itu dilakukan melalui pembentukan UUD baru yang memang dipersiapkan oleh AS. Tujuan pihak Sekutu, khususnya AS, adalah melaksanakan hukuman terhadap mereka yang dituduh sebagai “penjahat perang”, kecuali Kaisar Jepang yang dianggap sebagai spiritual simbol bangsa Jepang.³

Pada tahun 1960-an Jepang dapat dikatakan mendapatkan kekuatannya kembali sebagai negara industri maju mengimbangi kemampuan negara-negara maju Barat. Kehancuran fisik Jepang akibat kekalahan dalam Perang Pasifik tidak membawa bangsa Jepang mengalami kehancuran mental dan semangat sebagai bangsa yang sudah memiliki investasi intelektual dan tingkat ilmu pengetahuan yang sangat tinggi, Jepang dengan cepat dapat membangun kembali negaranya bahkan dapat menjadi super power di bidang ekonomi.⁴

Di bawah permukaan yang tenang, debat keras melanda Jepang berkenaan dengan masa depannya. Masa lalu Jepang masih mempengaruhi kehidupan masyarakat dinegara ini. Masyarakat terpecah menjadi dua pemikiran, yang setuju dan optimis bahwa Jepang harus mulai bangkit dalam kemandirianya bernegara, dan disalah satu sisi masyarakat yang masih trauma dengan apa yang pernah dialami Jepang sehingga mereka masih percaya bahwa lebih baik berada dibawah payung militer AS. Namun *status quo* dengan jelas menunjukkan bahwa Jepang

³ Abdul Irsan, *Op. Cit.*, Hal. 180

⁴ *Ibid*, Hal. 59

mulai kewalahan dalam menyikapi perkembangan dunia yang semakin dinamis dan kompleks.

Opini masyarakat tentang pertahanan Jepang masih bias untuk diarahkan ke *status quo*. Misalnya, dalam semua jajak pendapat nasional utama saat ini, mayoritas percaya bahwa Jepang harus mempertahankan *Japan Self Defense Force* (JSDF) pada tingkat anggaran sekarang dan kekuatan sekarang. Mereka juga percaya, bahwa Pasal 9 pada konstitusi 1947, yang menyatakan bahwa “kemampuan untuk perang sama sekali tidak boleh dipertahankan”, telah memberi kontribusi pada perdamaian di dalam kehidupan Jepang sampai saat ini.

Mereka juga mendukung tiga prinsip non-nuklir negara, dan percaya status non-nuklir Jepang akan berlanjut sampai masa mendatang. Walaupun jejak pendapat saat ini meyakini bahwa mayoritas masyarakat dunia percaya bahwa Jepang akhirnya akan memilih nuklir.⁵

Menjelang akhir abad XX Jepang terlihat lebih berani berpartisipasi menunjukkan eksistensi serta kekuatan angkatan pertahanan dengan mengirimkan JSDF dalam rangka *Peace Keeping Operation* ke berbagai negara di dunia seperti Iraq, Timor Leste, Sudan, dan Filipina. Pada tahun 1997-1998 Anggaran Pertahanan Jepang meningkat cukup signifikan. Pada tahun anggaran tersebut, Jepang mengalokasikan dana sebesar 38 miliar dolar AS, meningkat 2,1% dari anggaran tahun sebelumnya. Anggaran tersebut digunakan untuk pembelian beberapa peralatan perang baru seperti 18 buah tank tipe-90, 3 peluncur roket, 10 artileri, 9 sistem roket multi luncur, 27 helikopter berbagai tipe, 2 kapal perang

⁵ *Ibid*, Hal. 118-119

penghancur (*destroyer*), 1 kapal selam, beberapa pesawat latihan dan penyelamat. Selain itu dana tersebut juga digunakan untuk pengembangan JSDF, pemeliharaan fasilitas pertahanan, dukungan bagi pangkalan militer AS di Okinawa dan untuk penelitian dan pengembangan persenjataan.⁶

Kebijakan lain yang mengguncangkan dunia adalah pengumuman Perdana Menteri Shinzo Abe pada 9 Januari 2007 yang mengumumkan bahwa Jepang membentuk Departemen Pertahanan secara penuh dan Kementerian Pertahanan. Status Biro Pertahanan (*Japan Defense Agency/ Boeui Cho*) ditingkatkan menjadi *Japan Defense Department (Boei Sho)*. Peningkatan status ini juga diikuti dengan pengangkatan Kepala Biro Pertahanan Fukushiro Nukaga sebagai Menteri Pertahanan untuk pertama kalinya setelah Perang Dunia II.⁷

Pada bulan Juli, kabinet Abe menyetujui reinterpretasi dari klausul pasifis yang disebut Pasal 9, Shinzo Abe sebagai pemimpin Liberal Democratic Party berupaya melakukan mainstreaming campaign di kalangan politik dan masyarakat Jepang bahwa Jepang perlu membangun kekuatan pertahanan yang memadai untuk menghadapi perubahan situasi keamanan di Kawasan. Upaya tersebut membuahkan hasil dan pada tanggal 1 Juli 2014 Kabinet Jepang meratifikasi reinterpretasi Pasal 9. Selanjutnya, meningkatkan keterbukaan perekonomian Asia Pasifik demi mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Melakukan upaya aktif untuk mendorong demokratisasi dan pembangunan berkelanjutan, serta kerjasama Jepang-ASEAN untuk membangun perdamaian dan kesejahteraan di wilayah

⁶ Agus Salim, "Perimbangan Kekuatan Militer Pasca Perang Dingin", *Jurnal Sospol UGM*, Yogyakarta, 1999, Vol. 3. Hal. 28. Diakses di <http://jurnalsopol.fisipol.ugm.ac.id/index.php/jsp/article/view/120> vol. 3

⁷ Sugeng Riyanto, *Op. Cit.*, Hal. 5.

Indocina, termasuk dalam hal membangun forum untuk mendesain strategi pembangunan yang komprehensif⁸.

Upaya-upaya Shinzo Abe dalam meningkatkan pertahanan Jepang dibagi menjadi 3, yaitu: Pertama, Bekerjasama dengan ASEAN untuk meredam pengaruh China di kawasan, Perdana Menteri Shinzo Abe, melakukan upaya memperkuat diplomasi Asia dengan terlebih dahulu mengunjungi Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Upaya diplomasi yang dilakukan oleh Jepang di Asia Tenggara dan Australia adalah menggambarkan mengenai kepentingan ekonomi dan strategis pemerintahan baru di Tokyo. Jepang ingin meredam kebangkitan China yang ditandai oleh kebangkitan militer dan pengaruh perekonomiannya di Asia Tenggara. Kedua, Re-Interpretasi Pasal 9, Pada bulan Juli, kabinet Abe menyetujui reinterpretasi dari perjanjian pasifis yang disebut Pasal 9. Shinzo Abe sebagai pemimpin Liberal Democratic Party berupaya melakukan kampanye di kalangan politik dan masyarakat Jepang bahwa Jepang perlu membangun kekuatan pertahanan yang memadai untuk menghadapi perubahan kondisi keamanan di Kawasan. Upaya tersebut membuahkan hasil dan pada tanggal 1 Juli 2014 Kabinet Jepang meratifikasi re-interpretasi Pasal 9. Meningkatkan keterbukaan perekonomian Asia Pasifik demi mendorong pertumbuhan ekonomi Kawasan. Beberapa negara seperti Australia, India, Filipina dan Viet Nam telah mulai melakukan kerjasama di bidang industri pertahanan Jepang. Sebagai *follow-up* hasil kunjungan PM Shinzo Abe di Australia Juli 2014, kedua negara sepakat untuk melakukan kerjasama pembangunan kapal selam kelas Soryu buatan Jepang

⁸ Ananda F ayu, 2012. Upaya Jepang Dibawah Pemerintahan Shinzo Abe Dalam Meningkatkan Pertahanan Militer. Jurnal

yang disebut sebagai salah satu kapal selam konvensional (*diesel-powered*) terbaik di dunia.

Tahun 2013-2014 Jepang berada dalam peringkat 10 kekuatan militer dunia dari 106 negara, dan menempati urutan ke 6 dalam pengeluaran anggaran pertahanan yang mencapai 49.100.000000 dolar AS.⁹ Secara diam-diam, selama lebih dari tiga dasawarsa, Jepang telah menempa otot kekuatan industri pertahanan yang akan dengan mudah menyediakan kemampuan potensial jika negara itu memutuskan memasuki bidang tersebut. Jepang bersikeras untuk secara luas mengembangkan sektor-sektor teknologi tinggi yang berkaitan dengan kemampuan medan pertempuran pasca perang dingin yang sekarang sedang menyingsing. Optoelektronik Jepang dalam wujud senjata pertahanan bias dalam seperti sistem sensor dan pemandu yang tepat dan canggih untk peluru kendali pesawat terbang, dan alat peringatan dini mungkin akan lebih penting di medan tempur pada masa mendatang, yang lebih menekankan pada konflik yang berpindah-pindah dan sering kali berjarak jauh di laut, udara, atau bahkan angkasa luar. Kekuatan Jepang lainnya dalam miniaturisasi, otomasi, telekomunikasi, dan pengembangan material canggih tahan lama dan ringan, juga akan mempengaruhi kemampuan optoelektronik tersebut dan meningkatkan peranan potensi militer. Jepang juga akan mempunyai rekor kuat dalam manufaktur berkualitas. Dalam semua bidang ini, Jepang mendduki rangking pertama atau kedua dunia.¹⁰

⁹“Defense Spending Budget”, diakses dari <http://globalfirepower.com/defense-spending-budget.asp> pada 18 Mei 2014

¹⁰ Kent E Calder , *Asia's Deadly Triangle: How Arms, Energy, and Growth Threaten to Destabilize Asia Pasific*, Jakarta, Perason Education Asia, 1998. Hal. 111-112

Keseriusan pemerintah Jepang untuk membangun kembali sistem pertahanannya juga ditunjukkan oleh kebijakan kerjasama yang dibuat antara Jepang dan Prancis dalam pembangunan perangkat pertahanan, pengendalian ekspor, serta kerjasama di bidang nuklir. Shinso Abe juga berencana untuk menghidupkan reaktor nuklir serta pemerintah Jepang telah menyetujui legislasi pembentukan Dewan Keamanan Nasional. Di mana saat ini Dewan Keamanan Nasional sedang bertugas dalam mengumpulkan informasi keamanan dan mempercepat proses pengambilan keputusan mengenai hal tersebut.

Kehadiran kapal perusak milik Angkatan Laut Jepang DDH183 Izumo yang diperlihatkan di Yokohama yang diluncurkan secara resmi pada 6 Agustus 2013 juga melahirkan spekulasi mengenai keinginan Jepang yang kuat untuk memiliki kekuatan militer seperti di masa lalu.¹¹

Memperhatikan perubahan strategis sistem pertahanan Jepang, ada tiga poin yang perlu dicermati. Pertama, pertahanan baru ini merupakan keinginan kuat Jepang untuk mendapat pengakuan internasional. Jepang ingin dipandang sebagai kekuatan ekonomi sekaligus pertahanannya di mata dunia. Revisi pasal 9 Konstitusi Jepang menunjukkan keinginan Jepang menjadi “negara normal” (*normal state*). Kedua, perubahan ini juga ingin menunjukkan keinginan Jepang “menjaga jarak” dengan AS dalam aspek pertahanan dan keinginan untuk terlibat lebih aktif dalam kerja sama keamanan di kawasan Asia Pasifik. Ketiga, perubahan kebijakan ini secara jelas ingin menunjukkan rivalitasnya dengan Tiongkok yang sedang pada titik terendah sejak Perang Dingin berakhir.

¹¹ “Kebangkitan Militer Jepang?”, Rakyat Merdeka Online, 07 Agustus 2013 diakses di <http://www.rakyatmerdekaonline.com/> pada 18 Mei 2014

“Gerakan Anti Jepang” di beberapa kota besar di Tiongkok pada Maret 2005, terkait kian meningkatnya ketegangan hubungan kedua negara. Hal ini terutama disebabkan kekhawatiran Tiongkok atas kembalinya kekuatan militer Jepang di Asia Timur. Seperti yang dikemukakan oleh Jiang Lifeng, seorang pakar ilmu sosial dari *Chinese Academy of Social Sciences* (CASS) bahwa;

*The distrust between China and Japan on security matters will not disappear in the near future. But for a fairly long period, Japan is unlikely to be a security threat to China ...The possibility of Japan becoming militaristic as it was before the (Second World War) no longer exists.*¹²

Perubahan kebijakan Jepang untuk membangkitkan kembali perangkat serta sistem pertahanan Jepang yang mandiri bukan hanya sekedar fenomena perubahan kebijakan suatu negara, penulis berpendapat bahwa Jepang mulai melakukan pergesaran gaya kebijakan berpolitik sebagai dinamika dan perkembangan hubungan antara Jepang dan hal-hal yang mempengaruhi Jepang untuk kembali menggunakan sistem pertahanannya yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat ditarik sebuah pokok permasalahan, bahwa, **“Apa faktor yang mendasari Jepang membangun kembali sistem pertahanannya?”**

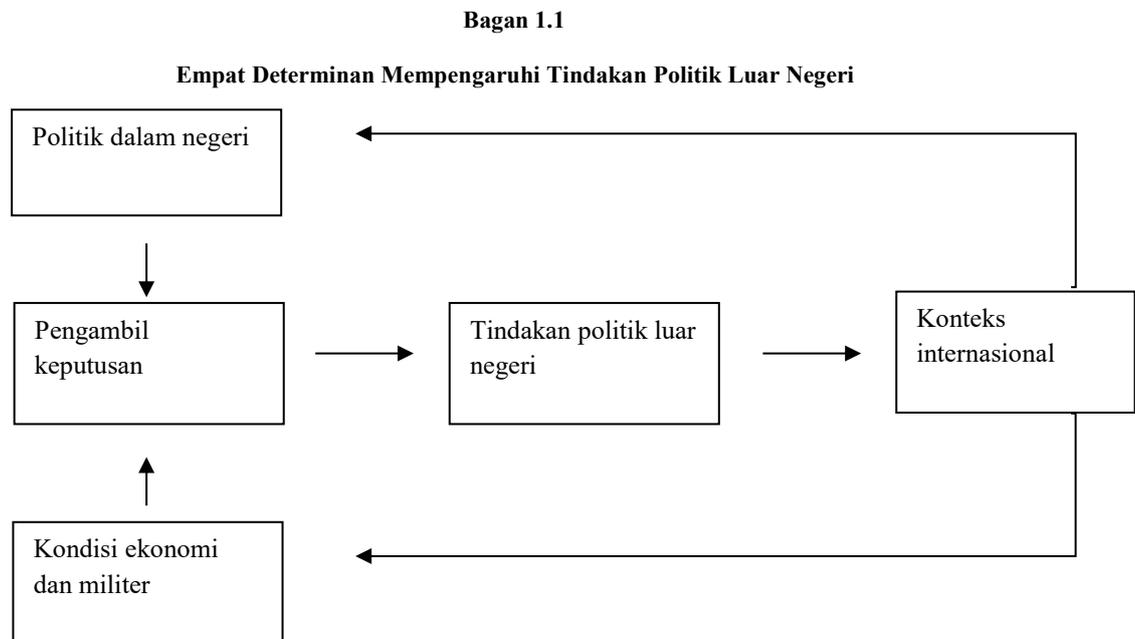
¹² Jian Yang, “China’s Security Strategy Towards Japan: Perceptions, Policies and Prospects”, ISBN 1175-1339, *Centre for Strategic Studies*: Victoria University of Wellington, 2001, hal. 8

C. Landasan Teori

Ada sejumlah ide dari beberapa tingkat analisis tentang peran politik dalam negeri, dalam penyusunan politik luar negeri.¹³ Menurut penulis fenomena kebijakan yang dibuat Jepang merupakan kebijakan dalam negeri yang ditujukan sebagai alat penyusun politik luar negeri yang dapat dijelaskan dengan konsep sebagai berikut.

C.1. Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri

Proses pengambilan keputusan Luar Negeri (William D. Coplin)



Sumber: William D. Coplin, *PENGANTAR POLITIK INTERNASIONAL Suatu Telaah Teoritis*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo) 2003, Hal. 170.

William D. Coplin mencoba menjawab asumsi yang didasarkan bahwa politik dibuat oleh orang-orang yang memegang peran dalam pengambilan

¹³ William D. Coplin, *Pengantar Poilitik Internasional Suatu Telaah Teoritis*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2003, Hal. 170.

keputusan politik adalah suatu hal tindakan yang tidak dapat dilakukan sembarangan. Akan tetapi kebijakan politik luar negeri tertentu dapat dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi (politik dalam negeri, politik luar negeri, kondisi ekonomi militer, dan konteks internasional) yang mempengaruhi para pengambil keputusan politik luar negeri. Pertama, kondisi politik dalam negeri mengambil keputusan luar negeri; kedua, kemampuan ekonomi dan militer; dan ketiga, konteks internasional, yaitu posisi khusus negara dalam hubungannya dengan negara lain dalam sistem.

Apabila kita akan menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara maka kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Tindakan politik luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat dari tiga konsederasi yang mempengaruhi para pengambil keputusan luar negeri termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku politik manusianya. Kedua, situasi ekonomi dan militer negara tersebut termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan/keamanan. Ketiga, konteks internasional (situasi di negara yang menjadi tujuan politik luar negeri serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapinya).¹⁴

Dengan kata lain pengambilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal satu negara dan faktor eksternal yang mempengaruhi

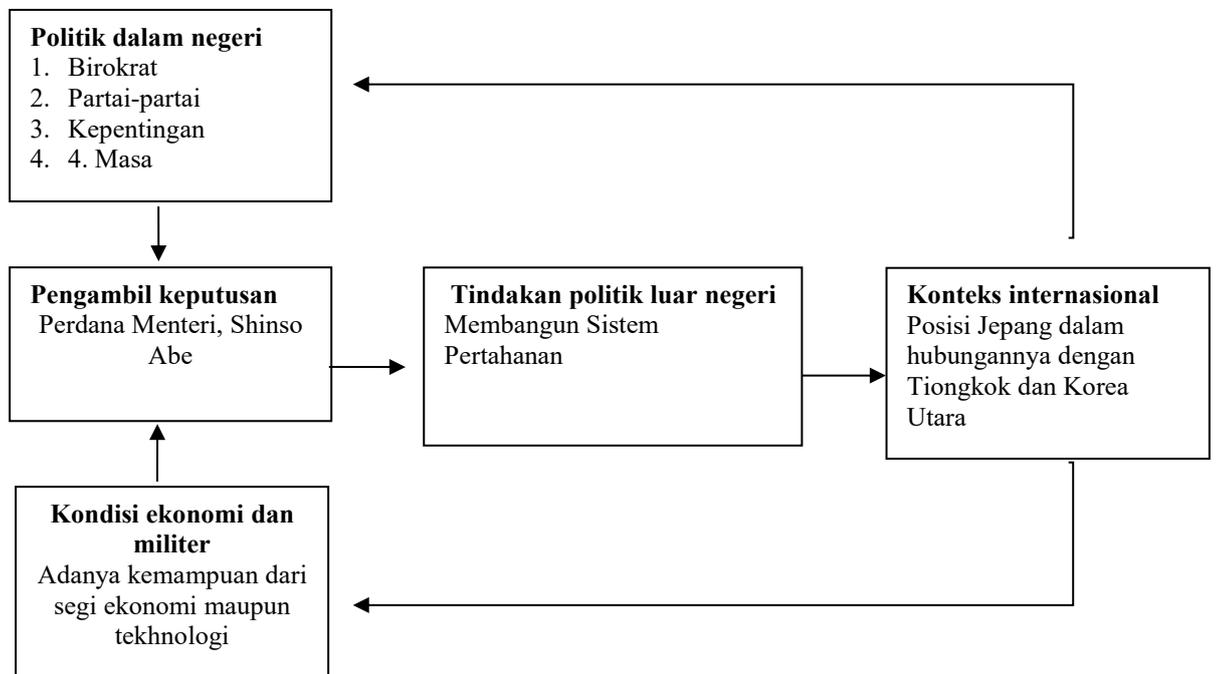
¹⁴ Djumadi M. Anwar, “Diktat Pliltik Luar Negeri Indonesia”, UMY, Oktober 2004.

suatu negara mengambil sebuah kebijakan yang diilustrasikan pada bagan di atas.¹⁵

Telah disinggung penulis di atas bahwa kebijakan yang dibuat Jepang merupakan kebijakan dalam negeri yang ditujukan sebagai alat penyusun politik luar negeri, yaitu kebijakan yang merubah garis besar kebijakan politik dalam negeri Jepang yaitu mengenai pertahanan Jepang sebagai bentuk bagaimana Jepang mengupayakan tujuan politik luar negerinya, dengan kata lain kebijakan Jepang dalam membangkitkan kembali sistem pertahanannya dapat dianalisis melalui dua faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan menurut William D. Coplin yaitu dipengaruhi faktor internal dan eksternal yaitu faktor politik domestik dan konteks internasional yang diuraikan sebagai berikut:

Bagan 1.2

Aplikasi Gambar Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri William D. Coplin



¹⁵ *Ibid*, Hal. 30.

1. Faktor Politik Dalam Negeri

Menurut teori William D. Coplin kondisi domestik memiliki pengaruh dalam menentukan output kebijakan luar negeri suatu negara, termasuk budaya dan sistem politik yang berjalan beserta variabel-variabel yang mempengaruhinya. *Domestic Politics* (situasi politik dalam negeri) termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku politik masnusiannya. Selain itu, pembuatan kebijakan luar negeri juga dipengaruhi oleh situasi politik dalam negeri yang tengah dihadapi. Dimana banyak analis politik internasional berargumentasi bahwa konsekuensi-konsekuensi yang mempersatukan dari krisis eksternal sering menyebabkan para pengambil keputusan politik luar negeri, yang dihadapkan pada instabilitas di dalam negeri, menjadi agresif di luar negeri.¹⁶

Teori ini menyebutkan bahwa dalam kaitannya terhadap politik luar negeri, politik dalam negeri berfokus pada hubungan antara para pengambil keputusan politik luar negeri dengan aktor-aktor politik dalam negeri, yang berupaya untuk mempengaruhi perilaku politik luar negeri.

Kerangka konseptual yang digunakan berfokus pada hubungan antara para pengambil keputusan politik luar negeri dengan aktor-aktor politik dalam negeri, yang berupaya untuk mempengaruhi perilaku politik luar negeri mereka. Aktor-aktor politik tersebut disebut dengan “*policy influencers*” (yang mempengaruhi kebijakan). Dengan memandang peran

¹⁶William D. Coplin, *Op. Cit.* Hal. 170

politik dalam negeri dalam penyusunan politik luar negeri sebagai interaksi antara *policy influencer*, yang akan menjelaskan proses politik dalam negeri yang menghasilkan politik luar negeri. Hubungan antara aktor-aktor politik dalam negeri tersebut dengan para pengambil keputusan politik luar negeri disebut “*policy influences system*” (sistem pengaruh kebijakan). Dengan memandang peran politik dalam negeri, dalam penyusunan politik luar negeri sebagai interaksi antara pengambil keputusan dengan *policy influencer*.

Perkembangan politik dalam negeri Jepang sangat tergantung pada pemimpinnya, dalam hal ini perdana menteri di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan di negerinya. Kerap kali terjadi banyak perbedaan dalam sebuah parlemennya. Dalam hal ini *Liberal Democratic Party* (LDP) yang hampir selalu menguasai kehidupan politik di Jepang, akan selalu berhadapan dengan DPJ atau *Democratic Party of Japan* (DPJ) yang merupakan oposisi, yang terkadang memunculkan perbedaan pendapat yang terjadi pada sebagian kecil dari sayap kirinya, dalam hal pembuatan keputusan, baik politik dalam negeri ataupun luar negerinya.

Fenomena peningkatan kapasitas pertahanan Jepang serta tuntutan perannya dalam perpolitikan internasional tidak hanya dapat dilihat dari sisi tuntutan ataupun kritikan dari Negara Barat, dengan segala kecanggihan dan kemajuan teknologi yang Jepang miliki Jepang secara sadar diri dapat melaksanakan hal tersebut dengan mudah. Keinginan membangkitkan kembali sistem militer Jepang, serta peningkatan

kapasitas dan kemampuan yang dirombak dan diperbaharui selama masa kepemimpinan Shinso Abe sebagai Perdana Menteri tidak dapat dilihat bahwa hal tersebut merupakan cerminan dari tuntutan dunia internasional. Melainkan lahir dari keinginan dalam negeri.

2. Faktor Ekonomi dan Militer

Faktor ekonomi dan militer, sangat mempengaruhi kemampuan diplomasi suatu negara, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan dalam pertahanan dan keamanan. Faktor ekonomi dan militer memainkan penting dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri karena berpengaruh terhadap kekuatan menekan yang harus dimiliki dalam hubungan luar negerinya. Negara-negara yang mempunyai kemampuan ekonomi dan militer yang kuat dipastikan akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam hubungannya dengan negara lain.

Menurut William D. Coplin, kemampuan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan melihat GNP-nya (*Gross National Product*), yaitu semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam satu tahun. Selain GNP, indikator ekonomi lainnya adalah GNP perkapita atau pendapatan perkapita serta dengan melihat potensi pertumbuhan ekonomi tersebut.¹⁷ Jadi dapat di asumsikan bahwa,semakin besar GNP negara tersebut maka semakin makmur dan kayalah negara tersebut. Ada pun dalam hal militer, terdapat dua kondisi terhadap kekuatan militer suatu negara.

¹⁷ *Ibid.* Hal. 151

GNP merupakan hal pertama, yang menunjukkan sumber daya umum yang tersedia untuk membangun dan memelihara kekuatan militer. Negara-negara yang GNP-nya tinggi pada waktu tertentu mungkin tidak kuat secara militer, karena negara tersebut memilih menggunakan kebanyakan sumberdaya mereka untuk konsumsi selain barang kekuatan militer. Akan tetapi pada umumnya, semakin tinggi GNP-nya, makin tinggi pula kemampuannya untuk menciptakan kekuatan militer, terutama untuk jangka panjang.

Dalam hal kondisi militer, mobilitas negara maju yang memberi keuntungan strategis. Kemampuan teknologi dan militer bangsa-bangsa yang maju memungkinkan untuk memproduksi massal dan penggunaan sistem logistik yang besar dan kompleks. Sehingga, negara maju memiliki mobilitas yang diperlukan untuk menghancurkan negara terbelakang secara cepat dan tuntas, sementara itu mereka kebal dan tahan terhadap serangan balasan.¹⁸ Dalam hal ini Jepang sebagai negara maju akan mendapatkan keuntungan strategis dengan mempunyai kekuatan pertahanan yang kuat.

Status quo Jepang saat ini masih terikat dengan pasal 9 konstitusi Jepang, yang berarti Jepang belum sepenuhnya dapat memiliki militer secara utuh dan normal. Namun untuk ukuran negara yang ditekan kekuatan militernya Jepang mempunyai rekor yang fantastis dalam hal

¹⁸ *Ibid*, Hal. 134

pembiayaan serta kemajuan industri, serta penelitian teknologi perang yang mereka punyai.

Kemampuan Jepang dalam ekonomi dan teknologi dwi-guna dan produksi dwi-guna dalam elektronik, telekomunikasi, mesin presisi, dan bahan-bahan dasar, memberikan kemampuan industri pertahanan dan militer ganda untuk mengembangkan industri senjata potensial di dalam negeri dan memasok mesin militer negara-negara lain. Dengan kekuatan ekonominya, Jepang dengan mudah dapat mendukung pembentukan militer yang lebih besar secara substansial dibanding sekarang.

3. Faktor Konteks Internasional

Faktor ketiga adalah konteks internasional, yang berupa situasi internasional dimana suatu negara melaksanakan politik luar negerinya yang ditujukan dalam mempengaruhi negara-negara lain. Hubungan politik dengan negara-negara lain dalam lingkungannya sangat berperan dalam keputusan politik suatu negara. Konteks Internasional memiliki peranan penting dalam menentukan politik luar negeri. Konteks internasional akan memungkinkan kita untuk menentukan politik luar negeri suatu negara hanya secara parsial, karena harus didukung dengan menelaah proses-proses politik luar negeri negara tersebut.¹⁹

Dalam memahami kasus politik luar negeri, masalah awal yang harus lebih dahulu di jelaskan adalah unsur kepentingan nasional dan kekuatan nasional suatu negara yang bersangkutan. Dengan kata lain dapat

¹⁹ *Ibid.* Hal. 168

dianggap bahwa politik luar negeri adalah penyeimbangan atau pemenuhan selisih antara kuantitas dan kualitas kepentingan nasional dan kekuatan nasional.²⁰

Konteks internasional dalam konteks skripsi ini akan dibawa pada posisi khusus negara tersebut dalam hubungannya dengan negara lain dalam sistem internasional, dimana merupakan suatu tindakan luar negeri pada suatu negara pada masa lampau, sekarang dan masa mendatang yang mungkin atau yang diantisipasi.

Dalam hal ini konteks politik internasional memainkan politik luar negeri yang penting. Seiring dengan meningkatnya konflik dan kekuatan antara Jepang dan kedua tetangganya Tiongkok dan Korea Utara yang semakin memanas. Selain itu hubungan politik luar dengan negara-negara lain dalam lingkungannya sangat berperan dalam keputusan-keputusan luar negeri suatu negara. Aliansi-aliansi bisa berdampak besar terhadap anggota-anggotanya dan bukan anggotanya, terutama apabila aliansi itu menyangkut pasukan-pasukan yang berada di wilayah asing. Selain aliansi, kemampuan untuk mendapat dukungan dari negara-negara lain dalam keadaan tertentu bisa mempengaruhi keputusan negara.

Setelah serangan teroris yang terjadi di AS pada 11 September 2001, AS mempunyai agendanya tersendiri terkait terorisme. AS mengubah kebijakan politik luar negerinya. Ekspektasi AS terhadap perkembangan Jepang setelah kejadian terorisme tersebut adalah Jepang

²⁰ Tulus Warsito, "Teori-Teori Politik Luar Negeri: Relevansi dan Keterbatasannya", dalam skripsi Rulia Rahmi, "Kinerja Perusahaan Asing Di Indonesia", HI FISIPOL UMY, Yogyakarta, 2006, Hal. 13

harus melonggarkan perannya sebagai “*Japan’s free ride*” di antara hubungan aliansi AS-Jepang. Jepang harus lebih mandiri dan beranjak dari payung keamanan AS. Menurut AS, Jepang harus memikul beban yang lebih besar dalam hubungan aliansi tersebut.²¹

Selain itu upaya Jepang dalam menjadi “*normal state*” juga didukung oleh Amerika dan negara-negara besar di Eropa karena Jepang dinilai sudah harus lepas dari bayang-bayang Amerika dan ikut berpartisipasi dalam perdamaian dunia.

C.2. Konsep *Security Dilemma*

Konsep *security dilemma* pertama kali dikemukakan oleh John Herz dalam Jurnal *world politics*.²² Herz berargumen bahwa negara yang hidup di dalam sebuah sistem yang anarki harus memperhatikan masalah keamanannya, baik dari serangan ataupun dominasi negara lain. Oleh karena itu, negara tersebut akan berusaha meningkatkan kekuatannya agar bisa terhindar dari ancaman kekuatan negara lain. Hal ini akan menyebabkan negara lain menjadi tidak aman dan berasumsi mengenai kemungkinan yang terburuk.

Karena tidak ada yang bisa merasa aman sepenuhnya dalam dunia yang penuh kompetisi ini, maka muncullah *vicious circle of security* (lingkaran setan keamanan) dan upaya peningkatan kekuatan yang

²¹ Kenneth B. Pyle, *Japan Rising: The Resurgence of Japanese Power and Purpose*, New York, Public Affairs, 2007, Hal. 340-341

²² John H. Herz, “Idealist Internationalism and the Security dilemma” *World Politics*, Cambridge University Press, 1950, Vol.2, No. 2.

sebesar-besarnya. *Vicious circle of security* merupakan gambaran situasi dimana negara-negara terjebak di dalam sebuah kekhawatiran tentang masalah keamanan. Negara-negara selalu merasa terancam atas peningkatan kekuatan negara lainnya dan selalu merespon dengan peningkatan kekuatan juga. Dari argument Herz tersebut, bisa dilihat bahwa rasa tidak aman yang disebabkan oleh ketidakpastian atas tujuan dari tindakan negara lain merupakan penyebab terjadinya kondisi tersebut. Hal ini yang disebut oleh Booth dan Wheeler sebagai *security paradox*.²³

Booth dan Wheeler menjelaskan konsep *security dilemma* lebih terperinci. Terdapat dua dilema yang saling berhubungan yang dialami oleh negara yang merasa terancam. Dilema pertama adalah dilemma interpretasi dan yang kedua adalah dilema dalam respon.²⁴

Dilema interpretasi adalah dilema dalam memahami tujuan dan kemampuan negara lain. Dilema ini merupakan sebuah kondisi ketika negara dihadapkan pada masalah keamanan yang di dalamnya terdapat dua pilihan sulit atau lebih dalam memaknai kebijakan militer negara lain, apakah kebijakan negara lain tersebut bertujuan hanya untuk pertahanan atau melakukan penyerangan. Dengan kata lain, sebuah negara akan memiliki dilema dalam memaknai tindakan negara lain, apakah tindakan negara lain tersebut bertujuan untuk mengancam negaranya atau tidak ataupun dilemma dalam memaknai kemampuan negara lain, apakah negara

²³ Ken Booth dan Nicholas J. Wheeler, *The Security dilemma: Fear, Cooperation and Trust in World Politics*, New York, Palgrave, 2008. Hal. 22

²⁴ *Ibid*

tersebut mampu untuk melakukan tindakan yang mengancam keamanan negaranya atau tidak. Jepang yang merupakan salah satu negara di Asia yang mengalami kekhawatiran terhadap Tiongkok, kini berusaha mengimbangi dengan meningkatkan anggaran belanja pertahanan.

Langkah Jepang meningkatkan anggaran pertahanannya tersebut, meskipun hal ini dimaksudkan sebagai bagian dari pertahanan nasional tetapi sesungguhnya ketika kita mencermati lebih dalam tentu dapat dipahami sebagai bagian dari respon Jepang terhadap pengembangan pertahanan Tiongkok.

D. Hipotesa

Berdasarkan rumusan masalah serta kerangka teori yang telah dipaparkan di atas, penulis membuat hipotesa sebagai berikut. Kebijakan Jepang dalam membangun kembali kekuatan sistem pertahanannya dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor politik domestik, yaitu kebijakan Jepang yang merepresentasikan sosok Perdana Menteri Shinso Abe yang ultra nasionalis dan berambisi bahwa Jepang mampu menjadi "*normal state*".
2. Faktor ekonomi dan militer, yaitu Jepang sebagai negara dengan laju perekonomian yang intens membutuhkan sokongan dari segi pertahanan untuk menjamin lancarnya jalan perekonomian yang bersaing dengan negara-negara tetangga. Dan dengan teknologi yang

Jepang saat ini sangat memungkinkan bagi Jepang untuk menjamin keamanan dalam sektor perekonomiannya sendiri.

3. Faktor konteks internasional, yaitu sebagai reaksi ataupun respon terhadap *security dilemma* karena meningkatnya kompleksitas konflik kawasan terutama terhadap negara tetangga Tiongkok dan Korea Utara.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dalam membuat skripsi ini adalah untuk mengetahui alasan yang mendasari Jepang melakukan perubahan kebijakan dalam membangkitkan kembali sistem pertahanannya menjadi *normal country*.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dilakukan dengan rentan waktu agar kajian ini bisa lebih terfokus. Dengan alasan tersebut, penulis dapat menetapkan batasan waktu yaitu pergeseran arah politik Jepang terkait pengembangan sistem pertahanannya sejak era Shinso Abe menjadi Perdana Menteri tahun 2006-2016.

G. Metodologi Pengumpulan Data

Penulisan data dalam skripsi ini menggunakan metode *library research*, yaitu diperoleh dari sumber-sumber lain berupa buku-buku atau literatur, surat kabar, majalah, maupun data-data yang bersumber dari internet.

H. Sistematika penulisan

Proses pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan menggunakan metode studi pustaka, oleh karena itu data yang akan diolah dalam penelitian ini adalah data sekunder, meliputi buku, makalah ilmiah, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, data internet, dan literatur lain yang dianggap relevan. Semua data tersebut pada akhirnya akan dianalisis dengan menggunakan konsep dan teori yang telah ditetapkan.

Dalam menganalisa data, penulis membuat sub-sub judul yang dapat menjawab permasalahan dan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Berisi alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka berfikir, hipotesa, metodologi penulisan, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II SEJARAH DAN DINAMIKA PERTAHANAN JEPANG

Penulis akan membahas mengenai sejarah dan pengetahuan mengenai pertahanan Jepang sesuai dengan era politik Jepang.

BAB III PERKEMBANGAN MILITER NEGARA-NEGARA KAWASAN

Berisi tentang perilaku dan sikap negara-negara kawasan yang semakin aktif terhadap kebutuhan maupun isu pertahanan militer nasional maupun internasional.

BAB IV FAKTOR KEBANGKITAN SISTEM PERTAHANAN JEPANG

Pada bab ini, terdapat pembuktian sebuah hipotesa yang ada pada pokok permasalahan, penulis akan memaparkan analisis mengenai faktor politik domestik yaitu mengenai peran Shinso Abe yang berambisi Jepang sebagai “*normal state*” serta faktor ekonomi dan militer yaitu sektor ekonomi Jepang yang membutuhkan dukungan dari sektor pertahanan. Serta kebijakan Jepang dalam meningkatkan sistem pertahanannya yang dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu konteks internasional yakni, meruncingnya konflik dengan negara tetangga Tiongkok dan Korea Utara.

BAB V KESIMPULAN

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan-kesimpulan terkait dengan bab yang sebelumnya dibahas.

DAFTAR PUSTAKA